BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RABU, 12 JUNI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [ ] NETRAL [X] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Desak Evaluasi Kepala OPD

Sikapi Gagalnya Raih Opini WTP

KOTA MANNA - Setelah gagal mendapatkan opini ajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, DPRD BS meminta agar ada ketegasan dari bupati untuk melakukan evaluasi jabatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini agar bisa mengurangi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penggunaan anggaran di setiap OPD jajaran Pemkab BS.

Tidak tegasnya bupati dinilai menjadikan BS selalu gagal meraih opini WTP dari BPK atas laporan keuangan. Menindaklanjuti hasil temuan BPK pada 21 Mei lalu, DPRD BS akan segera melakukan pemanggilan terhadap para kepala OPD. Pemanggilan ini guna menindaklanjuti temuan BPK terkait dengan beberapa persoalan aset dan kelebihan bayar yang dilakukan OPD, sehingga menyebabkan status WTP gagal diraih Pemkab BS.

Ketua DPRD BS Yevri Sudianto menyatakan persoalan gagal meraih WTP harus disikapi dengan serius oleh Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM. Menurutnya, Kabupaten BS merupakan kabupaten induk, sehingga jika status WTP selalu gagal, maka dipastikan sistem pelayanan pemerintahan juga akan semakin kurang baik. Bahkan ia juga khawatir apabila nanti BS akan kalah dengan Kabupaten Seluma dan Kaur yang merupakan pemekaran dari BS. "Secepatnya bupati evaluasi OPD terkait agar BS bisa raih WTP," harapnya.

Bahkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang good government, dewan sepakat dilakukan evaluasi jabatan oleh bupati. "Bila Kepala OPD memang tidak pas lagi di dinasnya maka bupati dapat evaluasi agar pemerintahan berjalan baik sesuai visi dan misi Kabupaten BS," tegas Yevri.**(tek)**